

SOSIALISASI PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PESERTA DIDIK SMIP UNIVERSITAS SIMALUNGUN

Ulung Napitu¹⁾, Corry¹⁾, Tutyariani Nasution¹⁾, Rosmeri Saragih¹⁾,
Desmi Triyanti Purba¹⁾

¹⁾ Universitas Simalungun

e-mail: ulungnapitu2018@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to provide understanding and re-grounding of the importance of the position of state ideology in the life of the nation and state in Indonesia, because Pancasila for the Indonesian people works as a philosophy of life and a view of life that is excavated from the crystallization of the socio-cultural values of the Indonesian nation. The importance of re-earthing the values of Pancasila in the lives of all levels of society because post-reformation until now has been found to be an indication of the strengthening of radicalism, intolerance and moral degradation in the lives of all levels of Indonesian society. If this condition continues to develop, it is feared that it will encourage disintegration of the nation. Moral degradation and radicalism have not only hit many people but have also entered the world of education. Therefore, it is important to implement the earthing of Pancasila to all levels of society in general and students in particular in all educational units.

To socialize and ground the material on the ideology of the Pancasila state to students, students use the lecture and question and answer method which lasts for 120 minutes.

With the socialization and grounding of Pancasila for junior high school students, the tourism industry of the USI Foundation, it is hoped that early on, students will be spared from various movements of radicalism, intolerance and moral decadence that are currently developing in the younger generation and students in particular. To socialize and ground the material on the ideology of the Pancasila state to students, students use the lecture and question and answer method which lasts for 120 minutes.

KEYWORDS: *Ideology, Pancasila, Strengthening, Students*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah hidup, ideologi negara, pandangan hidup dan dasar negara di gali dari kristalisasi nilai - nilai sosial budaya dan pranata sosial yang hidup dan berkembang ditenga - tengah masyarakat Indonesia sejak bangsa Indonesia ada dan secara yuridis formal dinyatakan secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia Pada tanggal 1 Juni

1945 oleh the founding fathers kita. Sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia seiring dengan dinamika bangsa Pancasila sebagai ideologi negara mengalami banyak tantangan, ancaman dan ujian yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa dan sekaligus sebagai ujian kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan tetap kokoh ditengah arus globalisasi hingga sampai saat ini.

Pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa hingga sampai saat ini dengan dimensi yang berbeda - beda telah banyak mengalami ancaman dan tantangan berupa adanya pengingkaran terhadap NKRI, Pancasila sebagai dasar negara Bhinneka Tunggal Ika berupa berkembangnya gerakan separatisme, radikalisme, maraknya KKN, demoralisasi, degradasi nilai sosial budaya erosimoral kebangsaan, krisis solidaritas bangsa, meningkatnya kerawanan masalah SARA dan berbagai gerakan sosial lainnya sebagai wujud pengingkaran kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila - sila Pancasila

Tantangan dan ancaman yang sangat massif tersebut, dan merespons tuntutan revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0 yang mengutamakan kecerdasan buatan serta perkembangan iptek yang sangat cepat pada era globalisasi ini, membawa dampak multidimensional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cenderung bersifat regresif. Ancaman dan tantangan tersebut apabila tidak diatasi dan diantisipasi dengan kebijakan yang tepat khususnya terkait dengan pembumian dan penguatan kembali ideologi negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mustahil "Negara Kesatuan Republik Indonesia" tinggal nama atau seperti negara lain yang terpecah-pecah, padahal hal tersebut sangat tidak kita harapkan terjadi di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan untuk mensosialisasikan dan membumikan kembali ideologi negara Pancasila kepada peserta didik SMIP Yayasan USI dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah bervariasi yang berlangsung selama 120 menit dan diselangselingi dengan tanya jawab antara narasumber dengan peserta didik dan guru. Para narasumber secara bergantian menyampaikan materi kepada peserta didik secara langsung dan

memberikan kesempatan untuk melaksanakan tanya jawab dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman tentang materi sosialisasi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Ideologi bagi Bangsa Indonesia

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita - cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani *eidos* yang berarti bentuk dan di samping itu ada kata *idein* yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian - pengertian dasar atau dalam pengertian sehari - hari, idea disamakan artinya dengan cita - cita. Cita - cita yang dimaksud adalah cita - cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita - cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Apabila menelusuri secara historis istilah ideologi, pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Tracy (kebangsaan Perancis) pada tahun 1796. Kemudian perhatian atas konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain, karena pengaruh Karl Mark dan menjadi *vokabuler* penting dalam pemikiran politik dan ekonomi Karl Mark yang mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya *Uberbau* atau suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di atas kekuatan - kekuatan yang memiliki faktor - faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu kebenarannya relatif, dan semata - mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif, karena mencerminkan kekuatan lapisan.

Ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandang hidup mereka. Nilai - nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan nilai - nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu.

Beberapa ahli dunia memberikan definisi yang berbeda - beda mengenai ideologi tetapi memiliki makna yang hampir sesuai demi mencapai suatu cita - cita yang diimpikan oleh pemegang ideologi yang telah dipelajari atau yang dipahami. Seperti ideologi yang dipahami oleh Martin Sileger menganggap ideologi sebagai sistem kepercayaan, Alvin Gouldner ideologi sebagai proyek nasional, dan Paul Hirst ideologi sebagai relasi sosial. Kita mengenal beberapa ideologi yang digunakan oleh negara-negara di dunia yaitu ideologi liberalisme, sosialisme - komunisme, dan Pancasila. Menurut Sastrapratedja (2001), mengatakan untuk mengenal ideologi Pancasila kita harus mengenal ideologi di dunia yaitu sebagai berikut; (i) Marxisme - Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, Penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; kedua proses perubahan sosial bersifat dialektis, (ii) Sosialisme suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep *welfare state*, (iii) Liberalisme suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu, dan (iv) Kapitalisme suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki.

Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu - satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan *science of ideas* dari founding father kita seperti Ir. Soekarno, Soepomi, M. Yamin, dan KH.Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan Ideologi Pancasila tanpa terkecuali.

Pancasila merupakan lima dasar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui *founding father* yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan, meliputi :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan lima dasar ini lah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terangan ideologi dunia dan kebudayaan global. Seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma - norma masyarakat umum, tantangan terbesar pada masa sekarang ini adalah tantangan narkoba dan terorisme (Direktorat Jendral Pembelajaran dan kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016).

Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang - undangan. Ada unsur penting kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. a) Kesiediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, Pluralisme merupakan nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini Pancasila diletakkan ke dalam ideologi terbuka. b) Aktualisasi lima sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara (Suseno, 2011).

Proses terjadinya Pancasila adalah melalui suatu proses kualitas. Artinya, sebelum disahkan menjadi dasar negara, baik sebagai pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia. Fungsinya adalah sebagai motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan merupakan sesuatu *living reality*. Pancasila sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menuntun segala tindak tanduk yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari - hari, sehingga tidak melanggar hukum dan juga tidak merampas hak - hak sebagai manusia.

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Sehingga apapun yang terjadi

dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaidah - kaidah yang berlaku atas dasar Pancasila. Syafruddin Amir, dalam penelitiannya yang berjudul *Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character* menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi (Amir, 2013).

Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara dinamika kehidupan Pancasila dan ideologi. Interaksi tersebut akan bersifat positif atau saling menguntungkan bilamana ia bersifat saling merangsang. Pancasila merangsang dan sekaligus menjiwai dinamika kehidupan itu sedangkan pada waktu yang sama dinamika kehidupan merangsang dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mengembangkan jati dirinya. Maka dari itu, Pancasila harus juga diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus muncul dan menjadi nyata dalam bidang integrasi NKRI, kehidupan ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan Perguruan Tinggi), dalam bidang politik dan pemerintahan, dalam bidang sosial - budaya, dalam bidang kehidupan beragama, dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan, dalam bidang lingkungan dan SDA, dalam bidang tenaga kerja dan SDM, dalam bidang gender dan perempuan, dalam bidang politik luar negeri, dalam bidang pembangunan pertanian, buruh dan nelayan, dalam bidang informasi dan komunikasi, dalam bidang pembangunan industri pariwisata, dalam bidang olahraga dan sport, dalam bidang pembangunan seni dan estetik, dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan, dalam bidang pembangunan industri dan penanaman modal (investasi), dalam bidang bisnis dan perdagangan, dalam bidang ketertiban dan keamanan, dan begitu seterusnya.

Selanjutnya, secara umum pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan, gagasan - gagasan, ide - ide, keyakinan - keyakinan, kepercayaan,

kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan), sosial, budaya, keagamaan. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan negara dalam arti cita - cita negara atau cita - cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut.

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita - cita, harapan, ide - ide, serta pemikiran - pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan.

Kompleksitas pengetahuan yang berupa ide - ide, pemikiran - pemikiran, gagasan - gagasan, harapan, serta cita - cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tinggi dalam negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya, maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Namun di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita - cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui

berbagai realisasi pembangunan, hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis."

Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa dengan ideologi, dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan - perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadi peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya.

2. Hakikat Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama - sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya, misalnya dengan batu, kayu, air raksa dan lain sebagainya.

Terkait dengan hakikat sila - sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam tiga kategori, yaitu;

- a. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsure - unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila - sila Pancasila menunjuk pada kata : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata - kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran,

berupa ke dan an (sila I, II, IV, dan V), sedangkan yang satu berupa per dan an (sila III). Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya.

- b. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri - ciri khusus sila - sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai - nilai agama, nilai - nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat - sifat dan Ciri - ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian, dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila.
- c. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan Negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari - hari, tempat, keadaan dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman.

Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila - sila yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Sila I : Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila II, III, IV, dan sila V.

Sila II : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, meliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan dijiwai sila III, IV, dan sila V.

Sila III : Persatuan Indonesia, meliputi dan dijiwai sila 1 dan II, meliputi dan menjiwai sila IV dan sila V.

Sila IV : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, diliputi dan dijiwai sila I, II, III meliputi dan menjiwai sila V.

Sila V : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai sila I, II, III, dan sila IV.

Untuk lebih menjelaskan tentang hal itu dapat diberikan contoh sebagai berikut.

“Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa - bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia paham kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam sila II itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, tegasnya kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang dimaksud dengan sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I. Begitu pula hanya dengan sila - sila yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sila II, III, IV, dan sila V pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila I”.

Adapun susunan sila - sila Pancasila adalah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan - urutan yang bertingkat (*hierarkis*). Tiap - tiap sila mempunyai tempatnya sendiri dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser - geser atau di balik - balik. Ditilik dari intinya, urutan lima sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Tiap - tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan merupakan pengkhususan sila - sila yang di mukanya.

Sekalipun sila - sila dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah - pisahkan satu dari yang lain, dalam hal memahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini mengenai kesimpulan, uraian atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

3. Isi Arti Materi Muatan Sila-Sila dalam Pancasila

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang lalai dalam bertingkah laku dan tidak mengamalkan arti nilai Pancasila. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai - nilai

Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari - hari.

Pengamalan Pancasila berarti mengupayakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan untuk diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Melalui Pancasila, diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur dan tercapai cita - cita negaranya. Sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari - hari. Berikut merupakan contoh - contoh pengamalan Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari - hari sesuai dengan nilai di setiap pasalnya;

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu, esa dalam zat - Nya, esa dalam sifat - Nya, esa dalam perbuatannya. Artinya, bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat - zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna - sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tiada dapat disamakan oleh siapa pun. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.

Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah - kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada

paksaan agama. Dengan perkataan lain, dalam Negara Indonesia tiada ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sila ini menekankan fundamen etis-religius dari Negara Indonesia yang bersumber dari moral Ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui "Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita - cita kemerdekaan Indonesia, untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Di sini, terdapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan Sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja, karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena itu, teologi kerja yang transendental memberi nilai tambah material, maka hal itu memperkuat motivasi di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menyangkarkan kepentingan (*interest*) kepada nilai (*value*) dalam politik."

Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil dan baik sebagai intisari nilai Ketuhanan. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari - hari: (i) Beribadah sesuai dengan agama

dan kepercayaan masing - masing dengan sepenuh hati; (ii) Membina kerukunan antar umat beragama. Tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda - beda. Tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah; (iii) Tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Setiap orang pasti menganggap agama atau kepercayaannya yang benar. Maka dari itu, tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita; (iv) Tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Menghina agama atau kepercayaan orang lain, maka dapat menimbulkan disintegrasi nasional.

Sila 2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan dan dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai - nilai, dan norma - norma. Kemanusiaan berarti bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*).

Di samping kemanusiaan, adalah adil yang mengandung arti, bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma - norma yang objektif tidak subjektif apalagi sewenang - wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya, jadi beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti, bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai - nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral, dengan demikian beradab dapat ditafsirkan sebagai dasar nilai - nilai kesusilaan atau moralitas, khususnya dan kebudayaan umumnya."

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma - norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya."

Potensi kemanusiaan dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, dan bersifat universal. Sama - sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai - nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Di dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah tersimpul cita - cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh harkat martabat manusia. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak - hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Berikut contoh pengamalan sila ke-2 dalam kehidupan sehari - hari: (i) Menolong teman, tetangga atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas; (ii) Memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam; (iii) Tidak semena - mena terhadap orang lain. Tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain. Saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain; (iv) Mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama - sama memiliki hak sebagai warga negara. Menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun media sosial.

Sila 3 : Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu (a) Makna geografis yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 950 — 1410 bujur timur dan dari 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan, dan (b) Makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah itu.

Pengertian Indonesia dalam sila Persatuan Indonesia adalah bangsa, jadi Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu, karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Persatuan Indonesia dalam sila ketiga, mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu lagu kebangsaan Indonesia Raya."

Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Berikut contoh pengamalan sikap sila ke - 3 dalam kehidupan sehari - hari: (i) Mengembangkan sikap cinta tanah air. Misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain; (ii) Rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan; (iii) Tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan posisi, jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misal ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar lebih tertib; (iv) Tidak

menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Menghindari dan melaporkan berita yang masuk dalam definisi hoax kepada pihak yang berwajib. Selain itu, juga tidak curang dalam mendukung pilihan pejabat publik.

Sila 4 : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan secara etimologi mengandung makna sebagai berikut.

- a. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila IV ini, berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah).
- b. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani.
- c. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.
- d. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun pada rakyat yang diwakilinya.

Sila keempat Pancasila mengandung beberapa ciri alam pikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945, bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”.

Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat) dan permusyawaratan (kekeluargaan). Cita - cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanu bari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarisme dari aneka bentuk penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita - cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ciri permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan/perwakilan. Karena itu, dengan “asas kekeluargaan” itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang samadalam hukum dan pemerintahan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan - badan perwakilan.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat kebijaksanaan”. Cita hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis sebagaimana dikehendaki Pembukaan UUD 1945, bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai - nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan. Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan, bahwa: “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permasyarakatan/Perwakilan”. Selanjutnya dikatakan: “Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila - sila Pancasila lainnya”. Orientasi etis (hikmat kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya

rasionalitas, kearifan, konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (mayorokratis) dan kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi).

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat syarat, yaitu ;

- a. Harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan.
- b. Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan.
- c. Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).
- d. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif yang dapat menangkal dikte - dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Pada sila keempat, tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmah dan bijaksana. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari - hari: (i) Tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksaan baik bagi orang lain; (ii) Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu, juga harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab; (iii) Ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Bagi yang dipilih, harus dapat amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemilih; (iv) Berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Bukan hanya secara langsung seperti demonstrasi, namun juga menggunakan media cetak maupun media sosial resmi milik pemerintah.

Sila 5 : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan kata seluruh

rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menurut UUD 1945 mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan, bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam Negara Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus, Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi atau apa yang oleh Soekarno sebut dengan prinsip *sociale rechtvaardigheid*, yakni persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme (yang menekankan kolektivitas) dan liberalisme (yang menekankan individualisme). Sila kelima bertolak dari pengertian, bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Pada sila kelima, tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari - hari: (i) Tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru; (ii) Berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih - milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya; (iii) Memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Memilih orang yang akan diberi bantuan berdasarkan perasaan pribadi dapat melukai orang lain; (iv) Tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Tujuannya adalah agar dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu juga harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain.

KESIMPULAN

1. Ideologi negara Pancasila selain sebagai sumber motivasi bagi peserta didik dan bagi bangsa Indonesia juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan bernegara. Oleh karenanya akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara peserta didik di lingkungan masyarakat, bangsa dan ideologi. Dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka, aspiratif, antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan - perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya, agar benar -benar mampu menampung aspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Berbagai ketimpangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah dalam bentuk KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang telah membudaya dalam kehidupan aparatur pemerintah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada masa orde baru mendorong seluruh elemen bangsa untuk terpanggil dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kembali nilai - nilai Pancasila melalui penguatan profil pelajar Pancasila bagi seluruh peserta didik pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan amanah kurikulum pembelajaran Tahun 2022 dan merdeka belajar.
3. Di zaman yang penuh dengan persaingan, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia - sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke - 4. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan sosial peserta didik saat ini, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia kuat, tangguh dan tidak kehilangan jati diri, pemerintah Republik Indonesia menggalakkan kembali kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh kalangan masyarakat, dan khususnya kepada kalangan peserta didik yang sangat rentan dengan gerakan intoleransi, radikalisme dan disintegrasi bangsa.

Pembumian ideologi negara pancasila setelah selesai dilaksanakan sosialisasi ini para pendidik dan kepala sekolah setelah stake holder lainnya dilingkungan SMIP Yayasan USI harus secara terencana dan berkesinambungan memberikan penataran kepada guru dan peserta didik tentang arti penting ideologi negara pancasila untuk memperkuat dan mempertahankan integrasi bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, Syarifuddin.(2013). Pancasila As Integration Philosophy of Education and National Character. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 2, Issue 1, January 2013
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta.(2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jendral Pembelajaran dan kemahasiswaan Kemenristek Dikti.(2016). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan kemahasiswaan.
- _____. (2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kaelan.(2003). Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:Paradigma
- Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. PARADIGMA :Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, Franz. (2011). “Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2--3 Mei 2013.Mubyarto. (1991). Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi: Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Bernegara dan Berbangsa, BP 7 Pusat, Jakarta

- Mubyarto.(1991). Pengantar Ekonomi Pertanian.PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Notonegoro.(1967). Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila : Pengertian Inti-Isi Mutlak Daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaan Secara Murni dan Konsekuen. Jakarta : Pancuran Tudjuh.
- _____. (1975). Pancasila Secara Populer Ilmiah.Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2004-2003.(2013). Empat Pilar Kehidupan Bangsa dan Negara.Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sastrapratedja.(2001). Pancasila sebagai visi dan referensi kritik sosial. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.